



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI WIYANA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **239530**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.775.537.805**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/206 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 194.508.300
2. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/46 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.917.660
3. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/132 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 403.977.575
4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/132 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 403.977.575
5. Tanah dan Bangunan Seluas 439 m2/160 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.038.847.770
6. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 701.954.860
7. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 701.954.860
8. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 194.399.205

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **548.744.995**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.050.355



2. MOBIL, HONDA SEDAN HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 222.964.670
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2,4 G M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 321.729.970

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 137.162.410

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.280.162.545

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.741.607.755

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.741.607.755

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.